

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia saat ini telah memasuki fase profesionalisasi yang menuntut peningkatan kualitas tenaga pendidik. Berdasarkan *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 27 Tahun 2008*, arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan menegaskan pentingnya pengembangan serta pembinaan pendidik agar menjadi tenaga profesional. Upaya ini bertujuan untuk mencegah munculnya fenomena *Pendidikan Tanpa Ilmu Pendidikan (PENTIP)* sekaligus memperkuat konsep *Pendidikan Dengan Ilmu Pendidikan (PENDIP)*. Salah satu unsur penting yang mendukung terwujudnya pendidikan profesional adalah terselenggaranya layanan bimbingan dan konseling. Secara yuridis, guru bimbingan dan konseling atau konselor diakui sebagai bagian dari tenaga pendidik profesional dalam sistem pendidikan nasional, sejajar dengan guru, dosen, pamong belajar, dan tutor sebagaimana tercantum dalam *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 1 butir 6. Sama halnya dengan pendidik profesional lainnya, guru bimbingan dan konseling diwajibkan memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana diatur dalam *Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*. Dalam konteks kelembagaan, guru bimbingan dan konseling berperan sebagai personel sekolah yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan (Prayitno, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru untuk jenjang SD, SMP, serta SMA, ditetapkan bahwa kualifikasi akademik minimal seorang guru adalah Diploma Empat (D-4) atau Sarjana (S-1). Dalam peraturan tersebut ditegaskan pula bahwa setiap guru wajib menguasai empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan tugas dan kinerja guru. Sejalan dengan ketentuan tersebut, guru bimbingan dan konseling (BK) atau konselor juga diharuskan mempunyai dan mengimplementasikan keempat kompetensi tersebut dalam praktik profesionalnya. Kompetensi kepribadian mencerminkan kemampuan guru BK dalam menunjukkan perilaku yang berakhlak mulia, memiliki kepercayaan diri, keteguhan prinsip, kewibawaan, serta menjadi teladan bagi peserta didik (Dahlan, 2017). Sementara itu, kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru BK dalam menyusun, menerapkan, serta menilai proses pembelajaran dan layanan konseling agar berjalan secara efektif dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Adapun kompetensi sosial mencakup kemampuan guru BK dalam membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan siswa, sesama pendidik, maupun masyarakat sekitar lingkungan sekolah (Prayitno & Marjohan, 2019). Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada kompetensi profesional, yakni kemampuan guru BK menguasai secara menyeluruh pengetahuan, keterampilan, dan teknik layanan bimbingan serta konseling. Kompetensi ini memungkinkan guru BK untuk memberikan layanan yang berkualitas sehingga siswa dapat memahami, menerima, dan menerapkan

nilai-nilai positif yang terkandung dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diberikan (Wibowo, 2019).

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa kehadiran tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam merancang dan mengimplementasikan program tersebut. Dalam hal ini, konselor atau guru bimbingan dan konseling (BK) memegang peranan yang sangat sentral dalam keberhasilan pelaksanaan layanan. Guru BK berfungsi sebagai pihak yang membantu peserta didik (klien) dalam proses bimbingan dan konseling melalui penerapan prinsip, pendekatan, serta teknik konseling yang tepat. Secara profesional, guru BK berperan sebagai fasilitator, konsultan, penasihat, sekaligus pendidik yang membantu peserta didik mengenali potensi diri, memahami permasalahan yang dihadapi, serta menemukan solusi yang konstruktif untuk mengatasinya (Billah *et al.*, 2023). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kompetensi profesional merupakan aspek krusial yang menentukan efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Kompetensi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas dan performa kinerja guru BK, tetapi juga terhadap tingkat partisipasi dan antusiasme siswa dalam mengikuti layanan konseling di sekolah. Guru BK yang memiliki kompetensi profesional tinggi cenderung mampu menciptakan layanan yang bermakna, berorientasi pada kebutuhan peserta didik, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang holistik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hidayati (2012) mengenai pelaksanaan program bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah se-Kota Pontianak menunjukkan bahwa sebagian besar guru bimbingan dan konseling belum mampu melaksanakan layanan secara optimal. Temuan penelitian tersebut

mengindikasikan bahwa penyusunan program bimbingan dan konseling masih dilakukan tanpa didasarkan pada hasil *need assessment*, serta belum terstruktur mulai dari perencanaan program tahunan, bulanan, hingga mingguan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program sering kali tidak selaras dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Program yang disusun cenderung hanya memenuhi aspek administratif, bukan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan. Hal tersebut mengisyaratkan masih terbatasnya kemampuan guru BK dalam memahami konsep dan prinsip dasar penyusunan program bimbingan yang efektif.

Lebih lanjut, hasil wawancara dalam forum Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di tingkat SMK memperlihatkan bahwa sebagian guru BK telah memahami konsep program bimbingan dan konseling komprehensif secara teoritis, namun belum mampu mengimplementasikannya secara praktis. Sementara itu, sebagian guru lainnya bahkan belum mengenal konsep program komprehensif tersebut dan masih menggunakan pendekatan program bimbingan konseling berbasis *Kurikulum 2017*. Selain itu, berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru BK tahun 2012, tingkat kompetensi guru bimbingan dan konseling di Kota Pontianak masih tergolong rendah, dengan rata-rata capaian sebesar 45,41%, yang menempatkan wilayah tersebut pada posisi kedua terendah di Provinsi Kalimantan Barat (Data LPMP Kalbar, 2012). Data ini memperkuat temuan bahwa kompetensi profesional guru BK, terutama dalam aspek pengetahuan akademik dan kemampuan teknis penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, masih perlu dioptimalkan secara signifikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hazrullah (2018), diperoleh

hasil bahwa guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Rukoh Banda Aceh telah memiliki tingkat pemahaman yang sesuai dengan keahliannya. Sebagian besar guru BK di sekolah tersebut berlatar belakang pendidikan Sarjana Bimbingan dan Konseling (S-1 BK), yang menjadi dasar penting bagi mereka untuk menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Kualifikasi akademik tersebut memungkinkan guru BK melaksanakan perannya secara efektif dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa guru BK di MAN Rukoh Banda Aceh telah mampu menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling yang terarah serta layanan siswa yang bersifat responsif terhadap kebutuhan mereka. Program tersebut berfungsi memfasilitasi peserta didik yang mengalami kendala proses belajar melalui mekanisme koordinasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran umum, dan guru pendidikan agama. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas layanan bimbingan dan konseling dalam membantu siswa mengatasi hambatan belajar. Selain itu, layanan bimbingan dan konseling juga berperan dalam membangun lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa merasa lebih nyaman dan didukung dalam proses pemecahan masalah yang mereka hadapi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menekankan bahwa keberadaan guru BK yang kompeten dan profesional memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan psikologis serta keberhasilan belajar siswa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Hasibuan (2019) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Medan, diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling (BK) pada satuan pendidikan tersebut telah memenuhi

kualifikasi akademik minimal, yaitu bergelar Sarjana (S-1) di bidang Bimbingan dan Konseling, serta memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun dalam pelaksanaan layanan konseling. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara administratif dan kualifikasi akademik, guru BK di MAN 2 Model Medan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional. Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap bahwa kompetensi profesional guru BK masih belum sepenuhnya memenuhi standar sebagaimana tercantum dalam *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK)*. Beberapa aspek penting dalam kompetensi profesional belum tercapai secara optimal, antara lain dalam kemampuan mengimplementasikan program bimbingan dan konseling komprehensif, serta dalam hal menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling.

Sikap siswa terhadap kompetensi profesional guru Bimbingan dan Konseling (BK) mempunyai fungsi yang krusial dalam menentukan efektivitas pelaksanaan layanan BK di sekolah serta pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Persepsi dan penilaian siswa terhadap kemampuan guru BK, termasuk pemahaman mereka mengenai tujuan layanan BK dan esensi profesionalisme dalam praktiknya, dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai mutu layanan yang diberikan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025/O/1995, tujuan utama bimbingan dan konseling di sekolah adalah memberikan layanan bantuan kepada peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, agar mampu mengembangkan kemandirian dan potensi diri secara optimal pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier melalui

beragam jenis layanan serta kegiatan pendukung yang berlandaskan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, sikap positif siswa terhadap guru BK berpotensi memperkuat keterlibatan mereka dalam kegiatan layanan, meningkatkan rasa percaya diri, serta mendorong keberhasilan program bimbingan dan konseling dalam membantu siswa memperoleh perkembangan yang optimal.

Kualitas layanan bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalisme guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam melaksanakan perannya. Guru BK yang memiliki sikap profesional merupakan faktor kunci dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik dalam aspek akademik, emosional, sosial, pembelajaran, maupun perencanaan karier. Profesionalisme yang dimiliki guru BK tidak hanya berdampak pada terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan psikologis siswa, tetapi juga berperan penting dalam memberikan layanan pendampingan karier yang efektif dan terarah. Dalam perancangan layanan BK di sekolah, guru BK dituntut memiliki pemahaman yang mendalam terhadap konsep dasar penyelenggaraan BK agar setiap kegiatan yang dilakukan selaras dengan landasan keilmuan dan asas-asas yang berlaku. Pemahaman yang komprehensif terhadap teori, prinsip, serta praktik bimbingan dan konseling memungkinkan guru BK untuk menerapkan layanan secara profesional, sistematis, dan beretika. Sebagaimana dinyatakan oleh Prayitno dan Erman (2013), guru BK harus senantiasa memperdalam pengetahuan dan wawasan keilmuannya, sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dan pengalaman dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang bermutu di lingkungan pendidikan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilaksanakan pada 5 Februari 2025 di SMA Negeri 17 Medan, diperoleh gambaran bahwa guru Bimbingan dan Konseling (BK) telah menunjukkan kompetensi profesional yang baik sesuai dengan ketentuan *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor* (SKAKK) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008. Kompetensi profesional tersebut meliputi kemampuan dalam memahami konsep dan praktik asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan konseli, penguasaan teori dan praktik bimbingan dan konseling, perancangan serta implementasi program BK yang komprehensif, penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan BK, kesadaran serta komitmen terhadap etika profesi, dan penguasaan konsep serta penerapan penelitian dalam bidang bimbingan dan konseling. Guru BK di SMA Negeri 17 Medan juga telah memenuhi kualifikasi akademik sebagai Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling. Sebelum merancang program layanan, guru BK terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan (*need assessment*) dengan menggunakan berbagai instrumen seperti *Daftar Cek Masalah* (DCM), sosiometri, dan *Alat Ungkap Masalah* (AUM), serta memanfaatkan hasil asesmen tersebut secara tepat dalam pelaksanaan layanan. Faktor penghambat bagi guru BK dalam melaksanakan program BK di SMA Negeri 17 Medan, dalam melaksanakan layanan konseling kelompok belum optimal dikarenakan gangguan di jam belajar, jikalau pulang sekolah sebagian siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Siswa bersikap positif terhadap guru BK SMA Negeri 17 Medan, dimana guru BK menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Guru BK yang menggunakan teknik yang interaktif, mendukung, dan berbasis solusi, seperti diskusi kelompok

atau konseling pribadi yang melibatkan siswa. Namun terdapat data keluhan siswa terhadap guru BK tentang kurangnya keterbukaan dan kepercayaan, siswa merasa tidak aman untuk terbuka pada guru BK karena khawatir masalah mereka disebarluaskan.

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah diuraikan, topik ini dipandang menarik dan relevan untuk diteliti karena berkaitan langsung dengan peranan penting guru BK dalam meningkatkan kualitas layanan serta pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Sikap siswa terhadap kompetensi profesional guru BK menjadi aspek penting yang perlu dikaji, mengingat persepsi dan respons siswa dapat memengaruhi efektivitas penerapan layanan bimbingan dan konseling. Atas uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada hubungan antara sikap siswa dan kompetensi profesional guru BK sebagai upaya memperoleh pemahaman empiris mengenai pelaksanaan layanan BK di lingkungan pendidikan formal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini diberi judul “Sikap Siswa terhadap Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling (BK) di SMA Negeri 17 Medan.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kompetensi akademik guru BK masih tergolong rendah.
2. Guru BK belum berkompentensi seutunya berdasarkan Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK)
3. Kurangnya keterbukaan dan kepercayaan siswa terhadap guru BK.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian berjalan secara terarah, perlu dilakukan pembatasan masalah sehingga fokus penelitian dapat dicapai secara optimal. Maka dibatasi permasalahan penelitian pada “ Sikap Siswa Terhadap Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 17 Medan.”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus umum penelitian ini adalah, yaitu :

1. Bagaimana sikap siswa terhadap Kompetensi Profesional Guru BK SMA Negeri 17 Medan ?
2. Sejauh mana siswa merasakan manfaat dari layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran “ Sikap Siswa Terhadap Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 17 Medan. ”

1. Mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap kompetensi profesional guru BK di SMA Negeri 17 Medan.
2. Memahami sejauh mana siswa merasakan manfaat dari layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK.
3. Data sikap siswa dapat digunakan menilai kesesuaian program BK dengan tujuan pendidikan di sekolah.

4. Mendapatkan umpan balik langsung dari siswa untuk memperbaiki kelemahan dalam pelayanan BK.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini menambah wawasan tentang kompetensi profesional guru BK dan sikap siswa, memperkaya khazanah ilmu pendidikan dan psikologi konseling, khususnya dalam memahami dinamika interaksi antara konselor (guru BK) dan konseli (siswa). Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pengembangan teori, model, dan kebijakan di bidang bimbingan dan konseling.

1.6.2 Secara Praktis

a. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling

Sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi peningkatan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling Dalam memperoleh penilaian nyata dari diri siswa sebagai penerima layanan BK, mengetahui kinerja kompetensi yang memadai dan yang perlu diperbaiki, bagi guru BK.

b. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini memberikan data konkret guna untuk mengevaluasi kinerja guru BK dan mengintegrasikan layanan BK dengan program BK secara holistik.

c. Bagi Siswa

Penelitian ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan

manfaat maksimal dari layanan BK, bukan hanya untuk mengatasi masalah saat ini, tetapi juga untuk membekali siswa dengan keterampilan menghadapi tantangan masa depan. Siswa merasa menjadi bagian aktif dalam pengembangan layanan BK.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, pengalaman, serta masukan bagi penulis dalam upaya menjadi konselor profesional yang kompeten dalam mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien.